

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Terdapat beberapa pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya :

Menurut Munawir (2004) pengertian laporan keuangan adalah :

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Menurut Harahap (2002) pengertian laporan keuangan adalah :

Laporan keuangan adalah merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis

Laporan Keuangan (2002), Laporan Keuangan adalah :

Laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) laporan keuangan adalah :

Laporan keuangan yang menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagaimana besar pengguna laporan. (IAI, 2012)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah :

- 1) Merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.
- 2) Merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya.
- 3) Merupakan laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain untuk kepentingan aktivitas ekonomi.
- 4) Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

IAI (2012) Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Jadi setiap perusahaan *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). Laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca adalah laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, liabilitas, dan ekuitas dari entitas tersebut (IAI, 2012). Persamaan akuntansi (disebut juga identitas neraca) merupakan dasar sistem akuntansi. Disisi kiri persamaan ini terkait

dengan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan, atau aktiva sumber daya yang merupakan investasi yang diharapkan untuk menghasilkan laba dimasa depan melalui aktiva operasi sisi kanan persamaan ini yang mengidentifikasi sumber pendanaan. Kewajiban (*liability*) merupakan pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan, atau klaim kreditor atas aktiva. Ekuitas atau ekuitas pemegang saham (*shareholders equity*) merupakan total dari (1) pendanaan yang menginvestasikan atau dikontribusi oleh pemilik (modal kontribusi) dan (2) akuntansi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik (laba ditahan) sejak berdirinya perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atas total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain (IAI, 2012). Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan untuk suatu periode waktu.

3. Laporan Perubahan Modal

Menurut Kasmir (2012) laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi :

1. jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini.
2. jumlah rupiah tiap jenis modal

3. jumlah rupiah modal yang berubah
 4. sebab-sebab berubahnya odal
 5. jumlah rupiah modal sesudah perubahan
4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang berisi informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dalam kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2012). Tujuan pokok laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu.

5. Laporan Catatan atas laporan keuangan

Menurut Kasmir (2012) laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

6. Laporan Kas

Menurut Kasmir (2012) laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan. Baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2012) yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dibutuhkan oleh pemakai sebagai salah satu cara untuk pengambilan keputusan

dalam kegiatan ekonomi dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban atas kinerja manajemen.

2.1.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report. Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi serta pendapat pribadi. Oleh sebab itu, di dalam penyusunannya laporan keuangan memiliki karakteristik tersendiri, Setiawan (2013). Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: 2012) dalam Setiawan (2013) adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.2 Teori Agensi

Agency Theory menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan principal (pemilik). *Principal* merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sementara agen adalah pihak yang diberi mandat. Dengan demikian agen bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal ialah pihak yang mengevaluasi informasi. Implementasi *Agency Theory* dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan *principal*. Di sisi lain, *principal* akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal, (Lestari, 2010).

Implementasi *Agency Theory* dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas, sehingga diharapkan agen bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan principal. Di sisi lain, principal akan memberikan insentif yang layak pada agen sehingga tercapai kontrak kerja optimal, Lestari (2010). Menurut Scott (1997) inti dari *Agency Theory* adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, perusahaan bertindak sebagai principal, sementara auditor independen merupakan agen. Konflik kepentingan dapat terjadi karena berbagai sebab, semisal asimetri informasi. Asimetri informasi dimaknai sebagai ketidakseimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama antara agen dengan principal. Efek dari asimetri informasi ini bisa berupa moral hazard, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja, bisa pula terjadi *adverse selection*, ialah keadaan di mana principal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

2.1.3 Audit

2.1.3.1 Pengertian Auditing

Definisi audit menurut *Arens et al.* (2010) menjelaskan bahwa pengertian auditing adalah:

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Artinya auditing adalah pengumpulan dan penilaian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan pengertian audit menurut Mulyadi (2002) :

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mencari bukti-bukti dengan cara objektif yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi dari auditing tersebut, dapat diuraikan 7 elemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit menurut Setiawan (2013) , yaitu:

1. Proses yang sistematis.

Dalam pelaksanaannya auditing dilakukan berdasarkan proses-proses rangkaian dan prosedur yang bersifat terstruktur, terorganisir, dan logis sesuai dengan ketentuannya.

2. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat individu atau entitas. Auditor kemudian melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh tersebut. Dalam penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti auditor harus bersikap objektif dalam pengungkapan fakta secara apa adanya, tidak memihak, dan tidak berprasangka buruk terhadap individu atau entitas yang membuat representasi tersebut.

3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi.

Asersi merupakan pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Jadi, asersi atau pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.

4. Menentukan tingkat kesesuaian.

Tingkat kesesuaian tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Bentuk kualitatif contohnya kewajaran laporan keuangan. Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Kriteria yang ditentukan.

Kriteria dapat berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan, dan anggaran atau ukuran lain kinerja manajemen. Kriteria yang ditentukan merupakan standarstandar pengukur untuk mempertimbangkan (*judgment*) representasi-representasi atau asersi-aseri.

6. Menyampaikan hasil-hasilnya.

Hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri dan kriteria yang telah ditentukan. Komunikasi dari hasil audit dapat memperkuat atau memperlemah kredibilitas atau pernyataan yang dibuat.

7. Para pemakai yang berkepentingan.

Para pemakai yang berkepentingan dari hasil audit diantaranya, investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut (Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka *jenis-jenis audit* dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Masih menurut sumber yang sama, menurut (Agoes, 2004), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. **Audit Operasional** (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh *manajemen* dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. **Pemeriksaan Ketaatan** (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. **Pemeriksaan Intern** (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. **Audit Komputer** (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing* (EDP).

2.1.3.3 Jenis-Jenis Auditor

Menurut *Arens et al.* (2010) terdapat beberapa jenis auditor yang berpraktik sekarang ini, diantaranya: Auditor Independen (Akuntan Publik), Auditor Pemerintah, dan Auditor Internal (*Internal Auditor*).

1. Auditor Independen.

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis *auditeenya*. Independen sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, objektif pada permasalahan yang timbul, dan tidak memihak pada kepentingan manapun. Perangkat yang harus dipatuhi oleh Auditor Independen adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik, dan *Quality*

Control. Auditor Independen memiliki hubungan profesional dengan manajemen perusahaan, dewan komisaris dan komite audit, internal auditor dan pemegang saham dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan audit atas laporan keuangan suatu organisasi.

2. Auditor Pemerintah.

Auditor pemerintah berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. Auditor pemerintah memiliki fungsi melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

3. Auditor Internal.

Internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Tugas dari auditor internal sangat beragam, tergantung pada tugas-tugas yang dibebankan oleh perusahaan kepada auditor. Tugas auditor internal dapat berupa audit ketaatan, audit operasional, evaluasi sistem komputer, dan termasuk bidang di luar akuntansi. Berdasarkan jenis-jenis auditor tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa semua instansi pemerintah maupun perusahaan swasta membutuhkan peran auditor untuk mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan bersifat operasionalisasi serta materialitas agar sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku.

2.1.4 *Audit Delay*

Menurut Dyer and McHugh (1975) *Audit delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Panjangannya masa *audit delay* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama *audit delay* yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan delay maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan yang sudah *go public* harus menyerahkan laporan keuangantahunannya disertai dengan opini auditor kepada Bapepam. Peraturan Bapepam tersebut diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan keuangan tahunan audit yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkan laporan keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, Sejak 30 September 2003, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan ke Bapepam menjadi 90 hari. Ketepatanwaktuan merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Waktu antara tanggal laporan keuangan dan laporan audit (*Audit delay*) mencerminkan ketepatanwaktuan penyampaian laporan

keuangan. Informasi yang sebenarnya bernilai tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2001). Tujuan menyeluruh dari suatu audit laporan keuangan adalah menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien sudah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hal yang penting terutama bagi perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan, Prasongkoputra (2013). Keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan karena keterlambatan informasi yang diterima dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, Prasongkoputra (2013).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran dapat diukur berdasarkan total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, rata-rata total aset, dan ekuitas (Almilia dan Devi, 2007). Menurut Sawir (2004), ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda:

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan.

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang.

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.

Machfoedz (1994) menjelaskan bahwa pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan Besar Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50.000.000.000 per tahun.
2. Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1.000.000.000 dan kurang dari Rp 50.000.000.000 per tahun.
3. Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1.000.000.000 per tahun.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi audit delay dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan regulator. Sehingga, perusahaan yang memiliki aset lebih besar cenderung akan menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu, agar para pemegang kepentingan lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan Lestari (2010), perusahaan besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil.

2.1.6 Holding Company

Fuady (1999) mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Holding company merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Maskapai induk (moedermaatschappij) melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (dochtermaatschappijen) yang kembali lagi melalui pemilikan saham (aandelenbezit) menguasai maskapai-maspakai anak lainnya (Purba, 2003). Menurut Purba (2003) dalam dunia bisnis, kehadiran *holding company* merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas\tersendiri; tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan *holding*. Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbul telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus,

dimiliki atau dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula yaitu *holding company* tersebut.

2.1.6.1 Proses Pembentukan *Holding Company*

Fuady (1999) menjelaskan secara umum proses pembentukan *Holding Company* dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu :

1. Prosedur residu

Dalam hal ini perusahaan asal dipecah pecah sesuai masing masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

2. Prosedur penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sarna/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan *holding*. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri cajan perusahaan *holding* ini dapat berupa :

- a. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sarna atau berhubungan, ataupun

- b. Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

3. Prosedur terprogram

Dalam prosedur ini pembentukan perusahaan holding telah direncanakan sejak awal start bisnis. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam groupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Dalam hal ini, jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnisari group usaha yang bersangkutan.

UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Fuady (1999) menjelaskan Istilah *holding company* tidak dikenal. Namun mengenai pengambilalihan (*acquisition*) dikenal dalam Pasal 103. Pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas. UU No.1 Tahun 1995 tidak menjelaskan berapa banyak pengambilalihan saham yang dapat dianggap sebagai peralihan pengendalian. Dijabarkan pula dalam Pasal 103 UU No.1 Tahun 1995 pada ayat (1) dan (2) disebutkan : (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang persebrangan. (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui

pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Perusahaan *holding* yang memiliki persentase kepemilikan modal pada anak perusahaan lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas anak perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi (IAI, 2007: PSAK No. 4 Par. 19). Dalam kaitannya dengan *audit delay*, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi sampai dengan proses tutup buku akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dalam penelitiannya Surbakti (2009) karena lingkup audit menjadi lebih luas untuk induk perusahaan *holding*, perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang terkadang lebih dari dua dan setiap anak perusahaan membutuhkan audit atau setidaknya menjadi salah satu objek audit (mengaudit saldo investasi di anak perusahaan). Jadi perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan lebih dari dua anak perusahaan proses pengauditan untuk laporan keuangannya akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan rentan terhadap *audit delay*.

2.1.7 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. Akuntan Publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, perpajakan dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan akuntansi. Sebagai profesi yang bersifat *public service*, maka profesi tersebut harus diakui oleh pihak tertentu. Pekerjaan untuk mengaudit laporan keuangan menuntut

tanggung jawab yang sangat besar dan harus didukung oleh kantor akuntan publik yang memiliki tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Membuktikan bahwa independensi auditor menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya. Kompetensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif.

Kepercayaan klien terhadap independensi dan kompetensi auditor, menyebabkan pemakai bisa mengendalikan diri pada laporan yang dibuat oleh auditor. Oleh karena itu untuk mendukung itu semua kantor akuntan publik demikian banyak jumlahnya. Tidaklah mungkin bagi pemakai laporan untuk menilai independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik sangat berpengaruh walaupun tidak menjamin sepenuhnya. Dijelaskan dalam (Pasal 3 ayat 2 dan 3 SK. Menkeu No. 43/1999), penanggungjawab KAP usaha kerjasama adalah dua orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner adalah salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan. Menurut (Jusup, 2001) Bentuk usaha Kantor Akuntan Publik yang dikenal menurut hukum Indonesia ada dua macam yaitu :

- a. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Sendiri. Kantor Akuntan Publik bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan.
- b. Kantor Akuntan Publik dalam bentuk Usaha Kerja sama. Kantor Akuntan Publik bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan. Auditor Empat Besar (*The Big Four Auditors*) adalah kelompok empat firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang

menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup.

Menurut Supriyati Yuliasri Rolinda (2007) Kantor Akuntan Publik internasional atau yang di kenal dengan *The Big Four* dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan Kantor Akuntan Publik lainnya. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara bagi Kantor Akuntan Publik besar untuk mempertahankan reputasinya, karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya.

Menurut Simamora (2002) Akuntan publik terdaftar (*certified public accountant firm*) dibangun dengan struktur organisasional yang terdiri atas :

1. Auditor staff

Auditor staff kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci, namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu diselia secara teliti.

2. Auditor senior

Auditor senior (*senior auditor*) disebut juga auditor penanggungjawab (*in charge auditor*) adalah auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta penyusunan rancangan laporan auditor, yang akan dikaji ulang dan disetujui oleh manager auditor dan *partner*.

3. Manager

Manager pada umumnya tidak berada di kantor klien untuk melakukan audit secara harian. Manager dapat bertanggungjawab atas penyeliaan/supervisori dua atau lebih perikatan audit sekaligus.

4. Rekan (*partner*)

Rekan (*partner*) atau pemilik (*owner*) adalah orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien.

Menurut Yuliana dan Aloysia (2004) Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi menjadi KAP *the big four* dan Kantor Akuntan Publik *non the big four*. Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four di Indonesia, yaitu:

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja.
3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio.

Keempat KAP *the big four* diatas dianggap memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan KAP-KAP lain di Indonesia (KAP *non big four*). Sehingga keempat KAP tersebut diatas diberi label KAP *the big four*. Hal tersebut juga didasarkan pada ukuran dan reputasi KAP tersebut dalam memberikan jasa audit. Watts dan Zimmerman, DeAngelo dalam Rusmin (2010) menyatakan bahwa kualitas auditor tergantung pada relevansi laporan auditor dalam memeriksa hubungan kontraktual dan dalam melaporkan pelanggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah penelitian oleh Puspitasari, Made Yeni Latrini (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh ukuran perusahaan, anak perusahaan, *leverage* dan ukuran KAP terhadap *audit delay* di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay* sedangkan anak perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Kartika (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* di Indonesia (studi empiris pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total asset, laba rugi operasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit delay* perusahaan, opini auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit delay*,

sedangkan faktor profit dan reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* perusahaan.

Ferdianto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010, Pengujian secara parsial memperlihatkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hernawati, Rahayu Sri (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tingkat *leverage* dan kualitas kantor akuntan publik terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan ukuran perusahaan, tingkat *leverage* dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan secara parsial hanya tingkat *leverage* yang mempengaruhi, variabel ukuran perusahaan dan kualitas KAP tidak mempengaruhi *audit delay*.

Destiana (2013) melakukan penelitian mengenai Determinan *ROA*, *DER*, *SIZE*, opini auditor dan kualitas auditor terhadap *auditdelay* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas auditor tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Prasongkoputra (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan ukuran KAP mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap *audit delay*, Sedangkan *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Setiawan (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran Perusahaan, reputasi auditor, opini audit, profitabilitas dan solvabilitas terhadap *Audit delay* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan, reputasi auditor, profitabilitas, solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Agrunigrum, Wirakusuma Made Gede (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kompleksitas operasi, reputasi KAP dan komite audit Pada *Audit Delay* hasil penelitian ini menunjukkan *leverage* berpengaruh pada *audit delay* sedangkan profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit tidak mempengaruhi *audit delay*.

Surbakti (2009) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan Ukuran perusahaan, kinerja keuangan mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap *audit delay*, jenis laporan audit mempunyai hubungan yang signifikan, perusahaan *holding* mempunyai

hubungan yang positif signifikan terhadap *audit delay* namun ukuran kantor akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ketut Dian Puspitasari Made Yeni Latrini	2014	Pengaruh ukuran perusahaan, anak perusahaan, <i>leverage</i> dan ukuran KAP terhadap <i>audit delay</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011	Ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> sedangkan anak perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
2.	Andi Kartika	2009	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> di Indonesia (studi empiris pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005)	Total asset, laba rugi operasi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> perusahaan, opini auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan faktor profit dan reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>audit delay</i> perusahaan.
3.	Rio Ferdianto	2011	Pengaruh ukuran Perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan reputasi KAP terhadap <i>audit delay</i> pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010	Pengujian secara parsial memperlihatkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
4.	Cindy Hernawati Sri Rahayu	2014	Pengaruh ukuran perusahaan, tingkat <i>leverage</i> dan kualitas kantor akuntan publik terhadap <i>audit delay</i> pada perusahaan	Secara simultan ukuran perusahaan, tingkat <i>leverage</i> dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>

			sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012	Secara parsial hanya tingkat <i>leverage</i> yang mempengaruhi, variabel ukuran perusahaan dan kualitas KAP tidak mempengaruhi <i>audit delay</i>
5.	Ari Destiana	2013	Determinan <i>ROA</i> , <i>DER</i> , <i>SIZE</i> , opini auditor dan kualitas auditor terhadap <i>audit delay</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010	Profitabilitas dan opini auditor mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> . Tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kualitas auditor tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i>
6.	Adi Nugraha	2013	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> (Pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011)	Profitabilitas dan ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>audit delay</i> , Sedangkan <i>leverage</i> tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>audit delay</i>
7.	Heru Setiawan	2013	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Opini Audit, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap <i>Audit delay</i> Pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011	Ukuran perusahaan, reputasi auditor, profitabilitas, solvabilitas berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>
8.	Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma	2013	Pengaruh profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Pada <i>Audit Delay</i>	<i>Leverage</i> berpengaruh pada <i>audit delay</i> sedangkan profitabilitas, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan komite audit tidak mempengaruhi <i>audit delay</i>

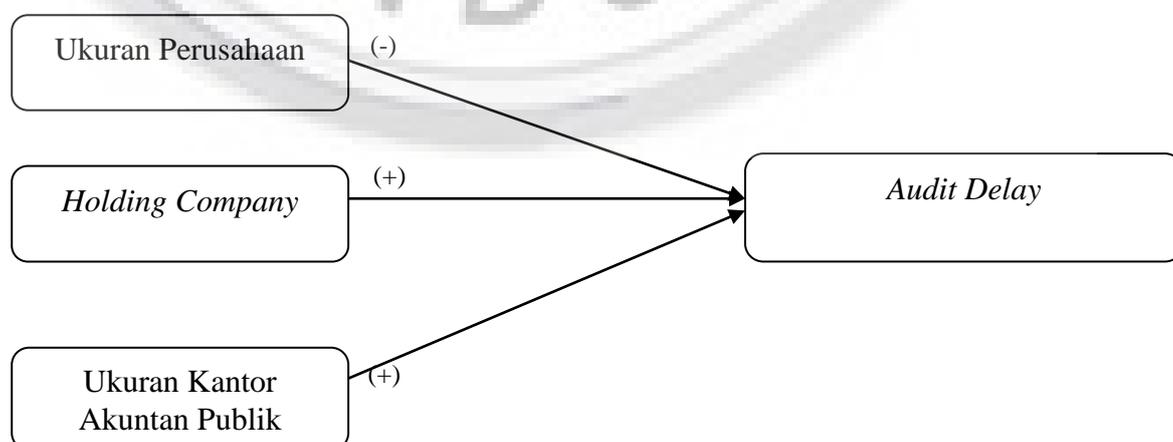
9.	Lophiga Surbakti	2009	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> pada perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia	Ukuran perusahaan, kinerja keuangan mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap <i>audit delay</i> , jenis laporan audit mempunyai hubungan yang signifikan, perusahaan <i>holding</i> mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap <i>audit delay</i> namun ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>
----	------------------	------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh ukuran perusahaan, *holding company* dan ukuran KAP (kantor akuntan publik) terhadap *audit delay*.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Ukuran dapat diukur berdasarkan total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, rata-rata total aset, dan ekuitas (Almilia dan Devi, 2007). Pada penelitian ini yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset. Menurut Dyer dan McHugh (1975) manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi *audit delay* dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan, dan regulator. Sehingga, perusahaan yang memiliki aset lebih besar cenderung akan menerbitkan laporan keuangannya secara tepat waktu, agar para pemegang kepentingan lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Puspitasari, Made Yeni Latrini (2014) variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dimana pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besar nilai aset suatu perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka perusahaan itu memiliki sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan laporan keuangan sehingga pengauditan atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, selain itu perusahaan besar diawasi oleh investor dan pengawas permodalan pemerintah, memiliki sumber daya yang lebih banyak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*

2.4.2 Pengaruh *Holding Company Terhadap Audit Delay*

Holding company merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Maskapai induk (moedermaatschappij) melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (dochtermaatschappijen) yang kembali lagi melalui pemilikan saham (aandelenbezit) menguasai maskapai-maspakai anak lainnya (Purba, 2003).

Perusahaan *holding* yang memiliki persentase kepemilikan modal pada anak perusahaan lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas anak perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi (IAI, 2007: PSAK No. 4 Par. 19). Dalam kaitannya dengan *audit delay*, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi sampai dengan proses tutup buku akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. penelitian yang dilakukan oleh surbakti (2009) membuktikan bahwa *holding company* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* hal ini terjadi karena perusahaan *holding* memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan auditnya, karena perusahaan tersebut memiliki lebih dari 2 anak perusahaan dan setiap anak perusahaan membutuhkan audit atau setidaknya menjadi salah satu objek audit (mengaudit saldo investasi di anak perusahaan). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Holding Company* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay*

Menurut *Arens et al* (2010), Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang telah *go public*, sebagian besar dari perusahaan besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil, serta organisasi nirlaba. Sebutan KAP merefleksikan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan diwajibkan telah berlisensi sebagai akuntan publik, sering pula disebut auditor eksternal untuk membedakan dengan auditor internal. Faktor ukuran KAP yang melakukan penugasan audit juga diduga memiliki pengaruh terhadap *audit delay* dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Supriyati Yuliasri Rolinda (2007) Kantor Akuntan Publik internasional atau yang dikenal dengan *The Big Four* dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Kantor Akuntan Publik yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan Kantor Akuntan Publik lainnya. Waktu audit yang lebih cepat adalah cara bagi Kantor Akuntan Publik besar untuk mempertahankan reputasinya, karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya.

Hasil penelitian Surbakti (2009) yang menyatakan bahwa kantor akuntan publik dalam hal ini auditor yang mendapat penugasan untuk mengaudit suatu emiten harus familiar dengan praktek akuntansi lokal dalam hal ini di negara Indonesia yang pastinya mempunyai regulasi atau standar yang dipakai. Metode

audit yang digunakan untuk menghasilkan sebuah opini apakah manajemen perusahaan itu efisien atau adakah personel perusahaan yang melakukan *fraud* atau melakukan kegiatan ilegal, dan juga apakah manajemen untuk membuat keputusan sudah secara ekonomis, efisien, dan efektif dibuat dan diimplementasikan, merupakan hal yang pastinya berbeda antara satu KAP dengan KAP yang lain. Tentu saja KAP yang termasuk big four mempunyai metode tersendiri dibandingkan KAP *non-big four* yang nantinya akan berpengaruh terhadap audit delay. Metode audit yang kompleks membuat pelaksanaan audit lebih mendetail sehingga akan berpengaruh terhadap panjangnya waktu *audit delay*.

Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Dian, Made Yeni (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, hal ini ditunjukkan bahwa KAP *big four* membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam menyelesaikan audit tepat pada waktunya dan didukung oleh sumber daya yang lebih banyak serta memiliki pengalaman yang lebih banyak dari KAP lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Ukuran Kantor Akuntan Publik Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap *audit delay*